



<https://doi.org/10.61292/eljbn.269>

Kinerja Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali)

I Dewa Gd. Irdyana Detha Anjana *

I Dewa Ayu Putri Wirantari

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Udayana

Correspondence: *odeirdyana@gmail.com

Abstract

Regional taxes play a pivotal role in enhancing Local Own-Source Revenue (PAD), which serves as a fundamental pillar for financing development and delivering public services at the regional level. This study aims to evaluate the performance of the Revenue Management Division within the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Bali Province in managing four types of provincial taxes: Motor Vehicle Tax (PKB), Motor Vehicle Title Transfer Fee (BBNKB), Fuel Tax (PBBKB), Surface Water Tax (PAP), and Cigarette Tax. Employing a qualitative descriptive approach, data were collected through interviews, documentation, and field observations. The analysis reveals that the division's performance is relatively effective based on indicators such as quality, quantity, timeliness, and inter-agency collaboration. The adoption of digital-based services like e-Samsat, electronic reporting systems, and institutional synergy has contributed significantly to the increase in PAD. Nevertheless, several challenges persist, including low taxpayer awareness in remote areas, technological limitations, and suboptimal handling of tax arrears. Through intensification and extensification strategies, data improvement, and persuasive as well as collaborative approaches, the division has successfully supported the achievement of sustainable regional fiscal independence.

Keywords : Regional Tax, Local Own-Source Revenue (PAD), Organizational Performance, Bapenda Bali, Tax Collection Effectiveness, Tax Service Innovation

Abstrak

Pajak daerah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang merupakan fondasi utama dalam membiayai pembangunan serta penyediaan layanan publik di tingkat daerah. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali dalam mengelola empat jenis pajak provinsi, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi lapangan. Hasil analisis mengindikasikan bahwa kinerja bidang tersebut tergolong cukup optimal berdasarkan indikator kualitas, kuantitas, efisiensi waktu, dan kerja sama antar pihak. Pemanfaatan layanan berbasis digital seperti e-Samsat, sistem pelaporan elektronik, serta sinergi antarinstitusi berkontribusi terhadap peningkatan capaian PAD. Meski demikian, tantangan masih dihadapi, antara lain rendahnya kesadaran wajib pajak di wilayah terpencil, keterbatasan teknologi, dan penanganan piutang pajak yang belum maksimal. Melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi, penyempurnaan data, serta pendekatan persuasif dan kolaboratif, kinerja unit ini mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kinerja Organisasi, Bapenda Provinsi Bali, Efektivitas Pemungutan, Inovasi Pelayanan Pajak

I. Pendahuluan

Pendapatan dari pajak daerah merupakan komponen kunci dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang memainkan peranan penting sebagai sumber pembiayaan utama dalam mendukung pembangunan dan

penyediaan layanan publik di daerah. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, PAD didefinisikan sebagai penerimaan yang diperoleh oleh pemerintah daerah melalui pungutan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. PAD mencerminkan penerapan prinsip desentralisasi serta menjadi salah satu sumber utama pendanaan daerah (Kurniasari, R., & Kurnia, K., 2021). Pajak daerah tidak hanya dimaknai sebagai alat fiskal semata, melainkan juga berfungsi sebagai sarana regulatif strategis dalam mengarahkan pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat keadilan sosial, serta menunjang kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Sesuai dengan prinsip-prinsip desentralisasi fiskal yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dalam implementasi desentralisasi tersebut, pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah turut mencakup pengalihan sumber pembiayaan, salah satunya melalui PAD. Komponen-komponen dalam PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta penerimaan daerah lain yang sah (Kementerian Keuangan RI, 2020). Sebagai elemen utama dari PAD, pajak daerah merujuk pada kontribusi yang wajib disetorkan oleh individu maupun badan usaha kepada pemerintah daerah, yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa imbalan langsung, dan ditujukan untuk membiayai kebutuhan daerah demi mencapai kesejahteraan masyarakat secara optimal (UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Di Provinsi Bali, pengelolaan pajak daerah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), yang merupakan salah satu perangkat daerah dengan peran strategis dalam penguatan kapasitas fiskal melalui optimalisasi penerimaan daerah. Bapenda Provinsi Bali memiliki tugas pokok "Optimalisasi PAD menuju kemandirian fiskal dalam pembangunan daerah Provinsi Bali." Untuk mewujudkan mandat tersebut, Bapenda terbagi ke dalam tiga bidang utama :

1. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Regulasi Pendapatan Daerah
2. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
3. Bidang Inovasi dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah

Fokus kajian dalam penelitian ini diarahkan pada Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola pendapatan dari sektor pajak dan sumber pendapatan lainnya. Salah satu subbidang penting dalam struktur ini adalah Subbidang Pajak Daerah, yang secara khusus menangani pemungutan dan pengelolaan empat jenis pajak utama di tingkat provinsi, yaitu :

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
2. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
3. Pajak Air Permukaan (PAP)
4. Pajak Rokok.

Keempat jenis pajak tersebut merupakan komponen yang sangat signifikan dalam struktur PAD Provinsi Bali. Oleh karena itu, menilai dan menganalisis kinerja Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah menjadi penting, khususnya terkait strategi yang diimplementasikan dalam meningkatkan efektivitas pemungutan, efisiensi administrasi perpajakan, serta tantangan yang dihadapi dalam realisasi target penerimaan pajak. Kinerja bidang ini akan sangat menentukan kontribusi pajak terhadap keseluruhan pendapatan daerah dan, pada akhirnya, terhadap kemandirian fiskal Provinsi Bali.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam kinerja Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah di lingkungan Bapenda Provinsi Bali dalam upaya peningkatan PAD. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada pihak terkait dan studi literatur untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika, strategi, serta dampak kebijakan pengelolaan pajak daerah terhadap penerimaan PAD.

II. Landasan Teori

Teori Kinerja Organisasi Publik

Menurut Chaizi Nusucha (dalam Harbani Pasolong, 2008:177), kinerja organisasi dapat diartikan sebagai tingkat efektivitas organisasi secara keseluruhan dalam memenuhi kebutuhan dan harapan seluruh anggotanya, serta dalam meningkatkan kapabilitas internal sesuai dengan tuntutan yang ada. Sementara itu, Sujardi (2009:7) menyatakan bahwa kinerja organisasi merupakan pencapaian hasil kerja suatu organisasi dalam rangka mengukur sejauh mana tujuan yang telah dirumuskan dapat diwujudkan. John Miner (dalam Sudarmanto, 2009:11-12) mengidentifikasi empat indikator utama yang digunakan untuk menilai kinerja organisasi, yaitu:

1. **Kualitas** : Kualitas merujuk pada derajat kesempurnaan hasil kerja yang dicapai oleh individu atau organisasi, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Semakin tinggi kesesuaian hasil kerja dengan spesifikasi atau harapan, maka semakin tinggi pula kualitas kinerjanya. Kualitas juga mencerminkan ketelitian, akurasi, dan keandalan dari pekerjaan yang diselesaikan.
2. **Kuantitas** : Kuantitas menunjukkan jumlah hasil kerja yang dicapai dalam kurun waktu tertentu. Indikator ini menilai produktivitas atau volume output, baik dalam bentuk barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh individu atau organisasi. Kuantitas penting dalam menilai seberapa besar kontribusi nyata terhadap pencapaian target atau tujuan organisasi.
3. **Penggunaan waktu** : Penggunaan waktu menggambarkan efisiensi kerja, yaitu bagaimana seseorang atau organisasi memanfaatkan waktu yang tersedia untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Penilaian difokuskan pada ketepatan waktu, kecepatan penyelesaian tugas, serta kemampuan menghindari pemborosan waktu dalam proses kerja.
4. **Kerjasama** : Kerja sama mengacu pada kemampuan individu atau kelompok untuk bekerja bersama orang lain dalam tim atau lingkungan organisasi. Indikator ini mencerminkan sikap kooperatif, saling mendukung, serta kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif untuk mencapai tujuan bersama.

III. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam mengenai kinerja Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali.

Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk menggali informasi secara menyeluruh terkait proses, strategi, kendala, dan hasil kinerja organisasi sektor publik, yang tidak dapat diukur secara kuantitatif semata. Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data dengan metode kualitatif deskriptif yaitu melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Wawancara dilakukan secara langsung kepada narasumber yang memiliki pemahaman dan keterlibatan dalam kegiatan pengelolaan pendapatan daerah. Wawancara bersifat semi-terstruktur agar memungkinkan eksplorasi informasi yang lebih luas terkait kinerja, strategi, serta tantangan yang dihadapi. Pengumpulan data juga dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen resmi, seperti Laporan Realisasi PAD, Laporan Kinerja Bapenda, Peraturan Daerah terkait pajak, SOP pelayanan pajak, dan data statistik lainnya yang relevan. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung aktivitas kerja pada Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, termasuk mekanisme pelayanan, system pemungutan pajak, dan interaksi antar unit kerja.

IV. Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Kinerja Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah

(Bapenda) Provinsi Bali, diketahui bahwa Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga stabilitas dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fokus utama dari bidang ini adalah optimalisasi empat jenis pajak provinsi, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok.

Jika dikaitkan dengan pandangan Chaizi Nusucha (2004:107 dalam Harbani Pasolong, 2008:177), kinerja organisasi mencerminkan efektivitas organisasi secara menyeluruh dalam memenuhi kebutuhan dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, Bapenda Provinsi Bali melalui Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah menunjukkan upaya sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam mengelola sumber-sumber pendapatan secara efektif sesuai dengan kebutuhan daerah. Lebih lanjut, menurut Sujardi (2009:7), kinerja organisasi merupakan hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi dalam upaya mencapai tujuannya. Hal ini tercermin dalam keberhasilan Bapenda mengelola dan memaksimalkan potensi penerimaan dari kelima jenis pajak provinsi, yang menjadi indikator capaian kinerja yang konkret.

Mengacu pada empat indikator kinerja organisasi menurut John Miner (dalam Sudarmanto, 2009:11-12), yaitu kualitas, kuantitas, penggunaan waktu, dan kerjasama, kinerja Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dapat dinilai dari beberapa aspek. Dari sisi kualitas, terlihat dari meningkatnya pelayanan dan inovasi dalam sistem pembayaran pajak. Dari segi kuantitas, dapat dilihat dari peningkatan realisasi target pendapatan daerah setiap tahunnya. Efisiensi waktu tercermin melalui digitalisasi pelayanan seperti e-Samsat dan integrasi data lintas sektor. Sementara kerjasama terwujud melalui sinergi antara Bapenda, kepolisian, perbankan, dan instansi lainnya dalam mengoptimalkan penerimaan pajak.

Dengan demikian, kinerja Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah tidak hanya berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi, tetapi juga menunjukkan efektivitas organisasi dalam menjalankan peran strategisnya untuk mendukung pembangunan daerah melalui peningkatan PAD.

Efektivitas Pemungutan Pajak

Dari aspek efektivitas pemungutan, Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah telah mengimplementasikan berbagai strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satunya melalui digitalisasi layanan pajak, seperti e-Samsat untuk PKB dan BBNKB, serta sistem informasi pembayaran daring lainnya yang mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pemanfaatan teknologi ini terbukti meningkatkan efisiensi pelayanan sekaligus memperluas jangkauan layanan ke seluruh wilayah Bali.

Namun demikian, efektivitas pemungutan masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya kesadaran wajib pajak di daerah terpencil, serta keterbatasan

infrastruktur teknologi informasi di beberapa wilayah kabupaten/kota.

Ketepatan Waktu Pelaporan

Berdasarkan grafik “Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Bali tahun anggaran 2019-2023”, dapat dianalisa sebagai berikut:



Sumber : Bapenda Provinsi Bali 2024

A. Tren Umum Kontribusi

Secara keseluruhan, kontribusi pajak daerah terhadap PAD Provinsi Bali dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi, tetapi tetap berada di atas 79%, dengan kontribusi tertinggi pada tahun 2023 sebesar 88%.

B. Analisis Per Tahun

Tahun 2019 :

- Pajak Daerah: Rp 3,463,996,393,584
- PAD: Rp 4,023,156,314,134.59
- Kontribusi: 86%
- Keterangan : Tahun ini menunjukkan kontribusi yang tinggi, menandakan dominannya peran pajak daerah dalam PAD.

Tahun 2020

- Pajak Daerah: Rp 2,607,990,396,693
- PAD: Rp 3,069,474,217,923.49
- Kontribusi: 85%
- Keterangan : Terjadi penurunan nominal akibat dampak pandemi COVID-19, namun persentase kontribusi tetap tinggi, menunjukkan stabilitas struktur pendapatan daerah.

Tahun 2021

- Pajak Daerah: Rp 2,458,530,858,700
- PAD: Rp 3,117,070,012,473.76
- Kontribusi: 79%
- Keterangan : Kontribusi terendah dalam periode ini. Hal ini kemungkinan karena pemulihan ekonomi yang belum optimal dan penerimaan pajak yang masih terbatas.

Tahun 2022

- Pajak Daerah: Rp 3,230,839,407,191
- PAD: Rp 3,863,191,406,848.23
- Kontribusi: 84%
- Keterangan : Mulai terjadi pemulihan baik dari sisi nominal maupun persentase kontribusi.

Tahun 2023

- Pajak Daerah: Rp 4,052,904,860,269
- PAD: Rp 4,627,741,217,667.29
- Kontribusi: 88% (tertinggi)
- Keterangan : Menandakan pemulihan ekonomi yang kuat serta Efektivitas kebijakan pemungutan pajak oleh Bapenda Provinsi Bali.

Konsistensi data per tahun menunjukkan bahwa pelaporan kontribusi pajak daerah terhadap PAD dilakukan secara tepat waktu dan akurat, memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi tahunan dan menyusun strategi peningkatan.

Berdasarkan hasil dokumentasi, Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah telah menerapkan sistem pelaporan berbasis digital yang memungkinkan sinkronisasi data secara real time antara subbidang dan unit kerja lainnya. Hal ini mendukung prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pendapatan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa keterlambatan pelaporan dari unit pelaksana teknis (UPT) di beberapa daerah yang mengalami kendala teknis maupun administratif. Bapenda Bali secara bertahap melakukan pembinaan dan supervisi untuk meningkatkan kedisiplinan pelaporan.

Strategi Peningkatan Pendapatan

Beberapa strategi peningkatan PAD yang telah dilakukan oleh Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah antara lain :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak kendaraan bermotor melalui razia gabungan dan sosialisasi kepatuhan.
2. Kolaborasi dengan pihak ketiga, seperti lembaga perbankan dan penyedia layanan digital untuk mendukung pembayaran pajak secara daring.
3. Penyempurnaan database wajib pajak untuk menghindari data ganda dan meningkatkan akurasi penagihan.
4. Pemberian insentif atau penghapusan denda untuk meningkatkan minat wajib pajak dalam melakukan pembayaran tepat waktu.

Strategi-strategi tersebut telah berkontribusi pada peningkatan kesadaran dan partisipasi wajib pajak, meskipun belum sepenuhnya merata di seluruh kabupaten/kota.

Penanganan Tunggakan dan Penagihan

Tunggakan pajak merupakan salah satu tantangan utama dalam pengelolaan pendapatan daerah. Untuk menanganinya, Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah melaksanakan pendekatan persuasif dan administratif, seperti pengiriman surat peringatan, serta kerja sama dengan pihak kepolisian dalam operasi penertiban pajak kendaraan.

Selain itu, penggunaan sistem pelacakan data kendaraan yang menunggak melalui integrasi dengan Dinas Perhubungan dan Kepolisian juga mulai diterapkan. Pendekatan ini terbukti meningkatkan efektivitas penagihan, meskipun jumlah tunggakan masih signifikan dan memerlukan langkah intensif lanjutan.

Inovasi Pelayanan Perpajakan

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan, Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah aktif mengembangkan inovasi, seperti :

1. Pengembangan aplikasi *mobile tax info* untuk memberikan informasi pajak secara cepat.
2. Layanan *drive-thru* dan *self-service kiosk* di kantor Samsat.
3. Sosialisasi melalui media sosial dan komunitas digital untuk meningkatkan literasi perpajakan masyarakat.

Inovasi-inovasi ini dinilai berhasil meningkatkan persepsi positif masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah dan mendorong budaya kepatuhan pajak.

V. Kesimpulan

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah di lingkungan Bapenda Provinsi Bali memiliki peran strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan empat jenis pajak provinsi, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok.

Kinerja bidang ini menunjukkan capaian yang positif dan relevan jika dikaji melalui perspektif teori kinerja

organisasi publik, khususnya berdasarkan indikator kualitas, kuantitas, penggunaan waktu, dan kerja sama. Dari aspek kualitas, inovasi layanan seperti e-Samsat, drive-thru, dan aplikasi mobile telah meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan perpajakan. Secara kuantitatif, realisasi PAD mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yang mencerminkan keberhasilan dalam pemungutan pajak. Dari sisi waktu, penerapan sistem pelaporan digital mendukung ketepatan pelaporan, meskipun masih terdapat kendala teknis di tingkat pelaksana. Sedangkan dalam hal kerja sama, Bapenda aktif menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti kepolisian, perbankan, dan instansi lain, guna memperkuat sistem perpajakan daerah.

Meskipun demikian, beberapa tantangan masih dihadapi, seperti kurangnya kesadaran wajib pajak di daerah terpencil, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta masih adanya tunggakan pajak yang signifikan. Untuk mengatasi hal tersebut, Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah telah mengimplementasikan berbagai strategi, termasuk intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, pembenahan database wajib pajak, pemberian insentif, serta pendekatan persuasif dan integratif dalam penagihan pajak.

Dengan demikian, kinerja Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah tidak hanya berkontribusi pada peningkatan PAD, tetapi juga mencerminkan efektivitas dan adaptabilitas organisasi publik dalam menjawab tantangan fiskal daerah serta mendorong kemandirian fiskal Provinsi Bali secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Amanda Yulia Damayanti, Annisa Nur Afifah, Suci Nasehati Sunaningsih, "Analisis Kontribusi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Magelang Tahun 2018-2021" Jurnal Maneksi, 2023
- Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali. (2024). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023*. Denpasar: Bapenda Provinsi Bali.
- Efendi, T., & Frinaldi, A. (2024). Inovasi sebagai Pilar Reformasi Birokrasi: Kajian Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Organisasi Sektor Publik. *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 2(4), 630-639.
- Kurniasari, R., & Kurnia, K. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(3).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 77/PMK.01/2020 Sudarmanto. (2009). *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Yogyakarta :
- Pustaka Pelajar
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.